



IPB University
— Bogor Indonesia —

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN 2022

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Institut Pertanian Bogor

2022



RINGKASAN EKSEKUTIF

a) Kebijakan Program Tahun 2022

Visi IPB 2019 - 2023

Dalam rangka menjawab tantangan era industri 4.0 dan menyelaraskan dengan visi jangka panjang IPB, maka visi IPB untuk periode tahun 2019 - 2023 adalah:

Menjadi perguruan tinggi berbasis riset dan terdepan dalam inovasi untuk kemandirian bangsa menuju *techno-socio enterpreneurial university* yang unggul di tingkat global pada bidang pertanian, kelautan, dan biosains tropika

Misi IPB

Misi IPB untuk periode tahun 2019 - 2023 adalah :

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan melakukan penguatan *research base university* agar menghasilkan lulusan *techno-sociopreneur* yang unggul, memiliki akhlak mulia yang berlandaskan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, nasionalisme tinggi, kompetensi profesional, *softskills* millennium, jiwa kepemimpinan, berwawasan global dan menjadi trend setter inovasi dan perubahan.
2. Memelopori penelitian unggul dan terdepan dalam IPTEKS yang transformatif untuk terciptanya kualitas kehidupan berkelanjutan, serta inovasi untuk ekonomi rakyat dan industri nasional.
3. Mendalami ilmu-ilmu terkini di bidang pertanian, kelautan dan biosains tropika untuk menjadi penentu kecenderungan ilmu terkini di tingkat nasional dan global.
4. Meningkatkan layanan proaktif yang berkontribusi dan memecahkan persoalan masyarakat dan meningkatkan peran IPB dalam menentukan arah kebijakan nasional.
5. Memperkuat sistem manajemen PT yang mampu menjadi pedoman pengembangan sistem manajemen modern pendidikan tinggi di era 4.0.

Tujuan IPB

Tujuan IPB untuk periode tahun 2019 - 2023 adalah:

1. Menghasilkan lulusan *techno-sociopreneur* unggul yg memiliki akhlak mulia berlandaskan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, nasionalisme tinggi, kompetensi profesional, *softskills* milenium, jiwa kepemimpinan, berwawasan global dan menjadi *trend setter* inovasi dan perubahan.

2. Menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang transformatif untuk terciptanya kualitas kehidupan berkelanjutan, serta inovasi konkret untuk ekonomi rakyat dan industri nasional.
3. Menjadikan IPB sebagai penentu kecenderungan ilmu-ilmu terkini di bidang pertanian, kelautan dan biosains tropika di tingkat nasional dan global.
4. Menjadikan IPB sebagai perguruan tinggi proaktif memecahkan persoalan masyarakat dan penentu arah kebijakan nasional.
5. Menjadikan IPB sebagai pelopor pengembangan sistem manajemen modern pendidikan tinggi.

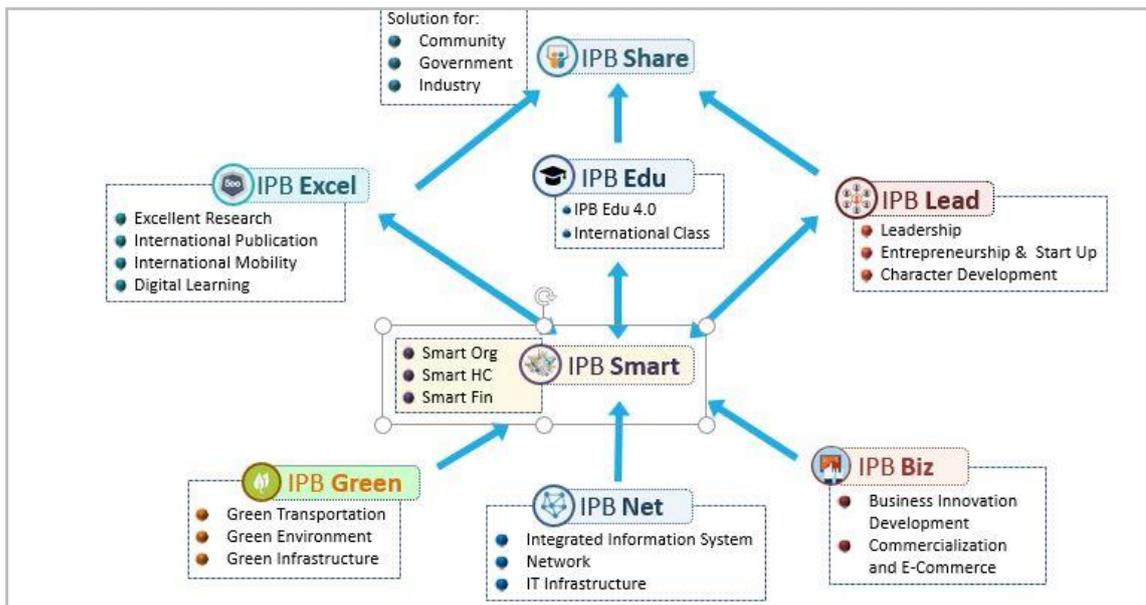
Strategi Pengembangan IPB 2019-2023

Strategi pengembangan IPB 2019-2023 yaitu:

1. Meneguhkan IPB sebagai *anchor academic excellence* yang menghasilkan lulusan *techno-sociopreneur* unggul berkarakter.
2. Mengkonstruksi ekosistem inovasi yang adaptif terhadap transformasi *digital society*.
3. Mengkapitalisasi capaian saat ini untuk memperkuat peran IPB sebagai *strategic alliance* dalam pembangunan daerah dan nasional.
4. Membangun semangat maju bersama dan transformasi kultur *excellence* dengan memperkuat *engagement* civitas akademika IPB dalam kerangka reformasi birokrasi dengan prinsip *learning organization*.
5. Menjembatani dan berperan aktif dalam membangun konektivitas lokal, nasional, dan global.

Program Utama IPB

Program utama IPB merupakan program unggulan sebagai bentuk realisasi atas penerapan konsep industri 4.0 di jenjang pendidikan tinggi. Terdapat 10 program utama IPB yang di dalamnya selaras dengan 10 bidang fokus pengembangan IPB 4.0.



b) Realisasi serta Proyeksi Kinerja PTN Badan Hukum tahun 2021 dan target kinerja tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Proyeksi s.d Desember 2021	Target 2022
1.	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	%	<80.0%	80.0%
		2	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (duapuluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	%	<30.0%	30.0%
2.	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	3	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.	%	20.0%	25.0%
		4	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	%	≥ 70,0%	60.0%
		5	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	Hasil penelitian per jumlah dosen	> 1	1.5
3.	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	6	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	%	100%	60.0%
		7	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	%	>35.0%	35.0%
		8	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	%	5,0%	5.0%
4.	Meningkatkan tata Kelola satuan kerja di Lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	9	Rata-rata predikat SAKIP satker minimal BB	predikat	BB	BB
		10	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	nilai	97,0	95,0

c) Biaya

KOMPONEN BIAYA	Realisasi 2020					
	APBN				SELAIN APBN	TOTAL
	Gaji dan Tunjangan PNS (001)	BPPTNBH dari Seditjen Dikti	Alokasi Pendanaan dari unit/ instansi lain	Pinjaman		
1. Biaya Dosen PNS	213.195.170	-	-	-	-	213.195.170
2. Biaya Tenaga Kependidikan PNS	66.970.627	-	-	-	-	66.970.627
3. Biaya Operasional	-	-	77.115.000	-	315.000.000	392.115.000
4. Biaya Dosen Non PNS	-	-	2.500.000	-	6.000.000	8.500.000
5. Biaya Tenaga Kependidikan Non PNS	-	-	27.500.000	-	3.000.000	30.500.000
6. Biaya Investasi	-	-	4.000.000	-	103.985.207	107.985.207
7. Biaya Pengembangan	-	42.535.978	26.176.369	-	324.000.000	392.712.347
8. Remunerasi	-	-	-	-	163.000.000	163.000.000
Total	280.165.797	42.535.978	137.291.369	-	914.985.207	1.374.978.351

KOMPONEN BIAYA	Anggaran 2021					
	APBN				SELAIN APBN	TOTAL
	Gaji dan Tunjangan PNS (001)	BPPTNBH dari Seditjen Dikti	Alokasi Pendanaan dari unit/ instansi lain	Pinjaman		
1. Biaya Dosen PNS	212.595.170	-	-	-	-	212.595.170
2. Biaya Tenaga Kependidikan PNS	66.970.627	-	-	-	-	66.970.627
3. Biaya Operasional	-	92.212.035	-	-	315.000.000	407.212.035
4. Biaya Dosen Non PNS	-	2.500.000	-	-	6.000.000	8.500.000
5. Biaya Tenaga Kependidikan Non PNS	-	27.500.000	-	-	3.000.000	30.500.000
7. Biaya Investasi	-	4.000.000	-	95.475.000	105.585.207	205.060.207
7. Biaya Pengembangan	-	12.263.000	48.974.978	-	324.000.000	378.798.978
8. Remunerasi	-	-	-	-	163.000.000	163.000.000
Total	279.565.797	138.475.035	48.974.978	95.475.000	916.585.207	1.479.076.017

KOMPONEN BIAYA	Anggaran 2022					
	APBN				SELAIN APBN	TOTAL
	Gaji dan Tunjangan PNS (001)	BPPTNBH dari Seditjen Dikti	Alokasi Pendanaan dari unit/ instansi lain	Pinjaman		
1. Biaya Dosen PNS	206.719.209	-	-	-	-	206.719.209
2. Biaya Tenaga Kependidikan PNS	68.410.244	-	-	-	-	68.410.244
3. Biaya Operasional	-	105.218.410	-	-	349.520.356	454.738.766
4. Biaya Dosen Non PNS	-	2.600.000	-	-	6.000.000	8.600.000
5. Biaya Tenaga Kependidikan Non PNS	-	27.600.000	-	-	3.000.000	30.600.000
8. Biaya Investasi	-	4.000.000	-	69.169.000	105.000.000	178.169.000
7. Biaya Pengembangan	-	14.715.000	96.836.995	-	345.638.460	457.190.455
8. Remunerasi	-	-	-	-	175.500.000	175.500.000
Total	275.129.453	154.133.410	96.836.995	69.169.000	984.658.816	1.579.927.674

c) Sumber Pembiayaan

SUMBER PEMBIAYAAN	REALISASI 2020	ANGGARAN 2021	ANGGARAN 2022
1. APBN	459.993.144	562.490.810	595.295.858
A. Gaji dan Tunjangan PNS (001)	280.165.797	279.565.797	275.129.453
B. BPPTN BH dari Setditjen Diktiristek	137.291.369	144.914.035	154.133.410
C. Pinjaman SBSN	-	95.475.000	69.196.000
D. Alokasi Pendanaan dari Unit/Institusi Lain	42.535.978	42.535.978	96.836.995
2. SELAIN APBN	914.985.207	916.585.207	984.658.816
A. Dana Masyarakat	985.207	985.207	1.000.000
B. Biaya Pendidikan	417.000.000	417.000.000	417.000.000
C. Usaha PTN BH	52.000.000	42.000.000	42.000.000
D. Kerja sama Tridharma Perguruan Tinggi	371.000.000	373.000.000	436.058.816
E. Pengelolaan Kekayaan PTN BH	22.000.000	22.000.000	22.000.000
F. APBD	35.000.000	41.600.000	41.600.000
TOTAL	1.374.978.351	1.479.076.017	1.579.954.674

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

Institut Pertanian Bogor (IPB) telah ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan dikukuhkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor. Sesuai dengan Pasal 63 dan 64 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, otonomi pengelolaan perguruan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, penjaminan mutu, efektifitas dan efisiensi, baik di bidang akademik maupun non akademik. Otonomi di bidang akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Otonomi pengelolaan di bidang non akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan program kerja di bidang organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 diatur terkait Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Peraturan pemerintah tersebut telah memberikan kepastian hukum mengenai bentuk dan mekanisme pendanaan IPB sebagai PTN Badan Hukum dari sebelumnya sebagai PT BHMN. Selanjutnya pada tahun 2015 untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 139 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

Status PTN-BH diawali dari Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT BHMN) pada tahun 2000, dimana empat perguruan tinggi pertama yang ditetapkan sebagai PT BHMN adalah Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Pertanian Bogor, dan Institut Teknologi Bandung. PT BHMN ini memiliki otonomi penuh dalam mengelola anggaran rumah tangga dan keuangan. Pada tahun 2009, bentuk PT BHMN digantikan dengan Badan Hukum Pendidikan Pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP). UU tersebut kemudian dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 tanggal 31 Maret 2010, yang membuat pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 yang mengembalikan status perguruan tinggi BHMN menjadi perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Status tersebut pun kemudian tidak bertahan lama karena begitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi diterbitkan dan berlaku,

seluruh perguruan tinggi eks PT BHMN, termasuk yang telah berubah menjadi perguruan tinggi yang diselenggarakan pemerintah, ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum

Sampai tahun 2013 perguruan tinggi negeri yang ditetapkan sebagai perguruan tinggi badan hukum milik negara berjumlah tujuh, yaitu: Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Indonesia (UI), Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Airlangga (Unair), dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Pada tahun 2015 PTN-BH bertambah menjadi sebelas perguruan tinggi dengan masuknya Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Hasanuddin (Unhas), dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS). Pada tahun 2021 berkembang lagi menjadi enam belas perguruan tinggi dengan bergabungnya Universitas Andalas, Universitas Brawijaya, Universitas Sebelas Maret, Universitas Negeri Malang, dan Universitas Negeri Padang.

Perguruan tinggi negeri badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi secara otonom diharapkan dapat mewujudkan pendidikan yang bermutu tinggi dan terjangkau bagi masyarakat, dan dapat menjadi perguruan tinggi kelas dunia.

B. Rencana Strategis, Visi, dan Misi IPB

Saat ini dunia berada pada era Revolusi Industri 4.0, yaitu generasi ke-empat dari perkembangan perubahan struktur sosial masyarakat, era yang bertumpu kepada jaringan internet, diwarnai oleh kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), era super komputer, rekayasa genetika, teknologi nano, mobil otomatis, inovasi dan perubahan yang terjadi dengan kecepatan eksponensial yang akan berdampak terhadap berbagai sendi kehidupan. Salah satu ciri dari Revolusi Industri 4.0 adalah munculnya *disruptive innovation* pada segala lini dan sendi kehidupan yang merubah Pola Pendidikan Global. *Disruptive Innovation* telah merubah masyarakat dari *Industrial Society* menjadi *Smart Society*; merubah gaya hidup dari *Time Constraint* menjadi *Connected dan Timeless*; generasi milenial menjadi generasi *Creative, Connected, Fast, Borderless, dan Collaborative Generation*.

Maka institusi pendidikan termasuk IPB harus mempersiapkan bantalan adaptasi dan mengoreksi '*mind set*' agar mampu bersenyawa dengan ekosistem Revolusi Industri 4.0. Mengapa hal ini harus menjadi *concern* IPB? Karena peserta didik atau mahasiswa IPB adalah berasal dari generasi ini. Perubahan ekosistem tatanan masyarakat dan gaya hidup akan sangat mempengaruhi cara dan pola belajar generasi ini. Institut Pertanian Bogor dengan berbagai keunggulannya saat ini memikirkan secara cermat kebijakan-kebijakan ke depan agar mampu menghasilkan pembelajar unggul dan lincah (*powerful agile learner*) yang mampu mengakomodasi kebutuhan yang relevan dengan perkembangan dan ekosistem di era revolusi industri 4.0.

Era ini juga membawa tantangan-tantangan pembangunan baru yang menuntut kontribusi IPB sebagai salah satu elemen bangsa. Diantara tantangan krusial yang dihadapi bangsa Indonesia pada era ini adalah: (a) pemenuhan komitmen SDGs 2030, (b) diskonektivitas pembangunan sektor agro dan maritim, (c) kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan, (d) masih rendahnya kesejahteraan insan agro-maritim, (e) belum kokohnya ketahanan pangan, (f) produktivitas dan daya saing sektor-sektor agro-maritim yang masih belum berkembang sesuai potensi, dan (g) ketimpangan pembangunan antar wilayah.

Konsep Agro-Maritim 4.0 merupakan kontribusi pemikiran IPB dalam merespon sejumlah tantangan krusial tersebut. Agro-Maritim 4.0 menawarkan *platform* pembangunan yang mengintegrasikan pengelolaan wilayah darat dan laut secara inklusif didukung oleh modal sosial dan ekonomi yang kuat serta pemanfaatan teknologi digital untuk mendorong produktivitas bangsa. Konsep pembangunan Agro-Maritim 4.0 memandang darat, laut, dan udara sebagai satu kesatuan yang melibatkan sistem sosial, ekonomi dan ekologi kompleks sehingga membutuhkan pendekatan transdisiplin, terpadu dan partisipatif. Agro-Maritim 4.0 dibangun berlandaskan semangat inklusifitas, transparansi, ramah lingkungan, kreativitas, berpikir kritis dan beretika. Tujuan pembangunan Agro-Maritim adalah untuk menciptakan keberlanjutan (*sustainability*), kemakmuran (*prosperity*), keadilan (*justice*) dan kedaulatan (*sovereignty*) bangsa Indonesia.

Visi, Misi dan Tujuan IPB

Dalam rangka menjawab tantangan era industri 4.0 dan menyelaraskan dengan visi jangka panjang IPB, maka visi IPB untuk periode tahun 2019 - 2023 adalah:

“Menjadi perguruan tinggi berbasis riset dan terdepan dalam inovasi untuk kemandirian bangsa menuju *techno-socio entrepreneurial university* yang unggul di tingkat global pada bidang pertanian, kelautan, dan biosains tropika”

Visi tersebut mengandung kata-kata kunci yang dijabarkan sebagai berikut:

PerguruanTinggi Berbasis Riset adalah perguruan tinggi yang:

- 1) Menciptakan iklim riset yang konsisten dan melahirkan hasil-hasil riset yang mampu berkiprah di ranah internasional dan berdampak pada peningkatan mutu IPB.
- 2) Memiliki kemampuan membangun sistem pendidikan dengan budaya riset yang kuat dan unggul.
- 3) Menjadikan hasil-hasil riset sebagai dasar di dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Memiliki kemampuan untuk membangun sistem kolaborasi yang fokus pada sinergitas riset berbagai disiplin ilmu atau inter/transdisiplin ilmu dan membentuk jejaring yang efektif dalam dan luar IPB.

- 5) Menyediakan dana dan sarana IPTEKS yang diperlukan dalam pengembangan inter/transdisiplin ilmu dan memberikan solusi bagi masyarakat dalam proses perubahan ekologi, ekonomi, sosial, dan budaya yang berkesinambungan.

Terdepan adalah menjadi pelopor, perintis, pemimpin, pemberi inspirasi, pemberi contoh dan teladan, agen perubahan dan menjadi rujukan utama.

Inovasi untuk kemandirian bangsa adalah kontribusi dalam menghasilkan kebaruan-kebaruan produk dan jasa dari hasil penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat memperkuat kemampuan bangsa Indonesia dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya yang berkualitas dan berkelanjutan serta berdaya saing.

Techno-socio entrepreneurial university adalah:

- 1) Perguruan tinggi yang menggunakan pendekatan teknologi, sosiologi, dan kewirausahaan secara seimbang sehingga tata kelolanya berfokus pada pengembangan kapabilitas kognisi dan teknologi dalam merespon maupun ikut aktif mengatasi persoalan yang dihadapi oleh bangsa; berkontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, penguatan industri dan pengayaan sosial; serta
- 2) memiliki daya tarik kuat bagi calon mahasiswa dan pihak lain untuk bekerjasama.

Unggul adalah:

- 1) Memiliki keunggulan berstandar internasional di bidang pertanian, kelautan dan biosains tropika.
- 2) Memiliki sistem budaya kerja yang memenuhi standar internasional dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi hingga mampu menghasilkan lulusan berkualitas dan unggul di tingkat nasional dan internasional.

Global adalah kesadaran diri warga IPB sebagai warga dunia (*global citizen*) yang memiliki kepedulian dan kontribusi pada bumi yang berkelanjutan (*the sustainability of the earth*) dan kesejahteraan warga bumi yang berkeadilan.

Bidang pertanian, kelautan dan biosains tropika adalah tiga bidang yang merupakan bidang strategis yang menjadi mandat IPB sesuai dengan statuta IPB, yang meliputi rumpun ilmu pertanian dan ilmu-ilmu terkait yang mendukung perkembangan dan pembangunan pertanian dalam arti luas untuk kemajuan bangsa Indonesia, termasuk ilmu-ilmu pengetahuan dasar, ilmu kelautan, keteknikan, humaniora, kesehatan, ekonomi, bisnis, manajemen, komunikasi serta ilmu-ilmu sosial dan politik.

Misi IPB untuk periode tahun 2019 - 2023 adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan melakukan penguatan *research base university* agar menghasilkan lulusan *techno-sociopreneur* yang unggul, memiliki

akhlak mulia yang berlandaskan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, nasionalisme tinggi, kompetensi profesional, *softskills* millennium, jiwa kepemimpinan, berwawasan global dan menjadi trend setter inovasi dan perubahan.

2. Memelopori penelitian unggul dan terdepan dalam IPTEKS yang transformatif untuk terciptanya kualitas kehidupan berkelanjutan, serta inovasi untuk ekonomi rakyat dan industri nasional.
3. Mendalami ilmu-ilmu terkini di bidang pertanian, kelautan dan biosains tropika untuk menjadi penentu kecenderungan ilmu terkini di tingkat nasional dan global.
4. Meningkatkan layanan proaktif yang berkontribusi dan memecahkan persoalan masyarakat dan meningkatkan peran IPB dalam menentukan arah kebijakan nasional.
5. Memperkuat sistem manajemen PT yang mampu menjadi pedoman pengembangan sistem manajemen modern pendidikan tinggi di era 4.0.

Tujuan IPB untuk periode tahun 2019 - 2023 adalah:

1. Menghasilkan lulusan *techno-sociopreneur* unggul yg memiliki akhlak mulia berlandaskan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, nasionalisme tinggi, kompetensi profesional, *softskills* milenium, jiwa kepemimpinan, berwawasan global dan menjadi *trend setter* inovasi dan perubahan.
2. Menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang transformatif untuk terciptanya kualitas kehidupan berkelanjutan, serta inovasi konkrit untuk ekonomi rakyat dan industri nasional.
3. Menjadikan IPB sebagai penentu kecenderungan ilmu-ilmu terkini di bidang pertanian, kelautan dan biosains tropika di tingkat nasional dan global.
4. Menjadikan IPB sebagai perguruan tinggi proaktif memecahkan persoalan masyarakat dan penentu arah kebijakan nasional.
5. Menjadikan IPB sebagai pelopor pengembangan sistem manajemen modern pendidikan tinggi.

Strategi pengembangan IPB 2019-2023 yaitu:

1. Meneguhkan IPB sebagai *anchor academic excellence* yang menghasilkan lulusan *techno-sociopreneur* unggul berkarakter.
2. Mengkonstruksi ekosistem inovasi yang adaptif terhadap transformasi *digital society*.
3. Mengkapitalisasi capaian saat ini untuk memperkuat peran IPB sebagai *strategic alliance* dalam pembangunan daerah dan nasional.
4. Membangun semangat maju bersama dan transformasi kultur *excellence* dengan memperkuat *engagement civitas* akademika IPB dalam kerangka reformasi birokrasi dengan prinsip *learning organization*.
5. Menjembatani dan berperan aktif dalam membangun konektivitas lokal, nasional, dan global.

Skenario pelaksanaan Misi IPB Periode 2019-2023 terdiri atas 5 tahapan sebagai berikut:

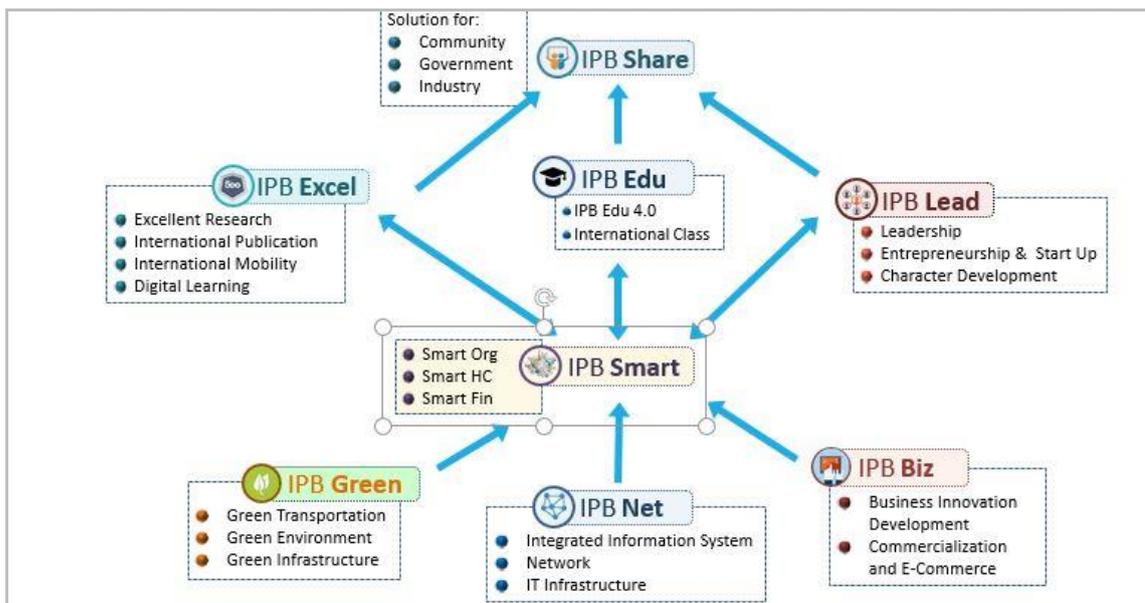
1. Tahun 2019 tahapan dalam rangka membangun *excellent innovation ecosystem*. Fokus pengembangan IPB pada tahun 2019 adalah membangun ekosistem inovasi yang kondusif bagi tumbuhnya inovasi melalui (1) sistem insentif berkeadilan dan terbuka, (2) pengembangan sistem informasi dan komunikasi yang handal, (3) reorientasi kurikulum, dan (4) pengembangan sarana-prasarana.
2. Tahun 2020 adalah *engaged & competent human capital*. Fokus pengembangan IPB pada tahun 2020 adalah mendorong terciptanya SDM unggul melalui semangat maju bersama dan transformasi kultur *excellence* dengan memperkuat *engagement* civitas akademi IPB dalam kerangka reformasi birokrasi dengan prinsip *learning organization*.
3. Tahun 2021 adalah *excellent innovation*. Fokus pengembangan IPB pada tahun 2021 adalah mengembangkan *excellent innovation* melalui penguatan sistem manajemen RBU (*Research Based University*) terintegrasi menuju TSEU (*Techno Socio Entrepreneurial Univeresity*). Institusi mendorong kepemimpinan dalam penelitian yang mengarah pada penciptaan dampak sosial dan ekonomi yang tinggi. Penelitian seperti ini akan mengarah pada dua jalur, yaitu jalur inovasi komersial/ekonomi dan jalur inovasi sosial. Tidak semua hasil penelitian layak untuk dijalankan sebagai aktivitas komersial, akan tetapi lebih tepat dijalankan sebagai fungsi sosial.
4. Tahun 2022 adalah *enriched & empowered society*. Fokus pengembangan IPB pada tahun 2022 adalah menguatkan *enriched & empowered society*, melalui dorongan kepemimpinan yang mendayagunakan ilmu dan pengetahuan serta inovasi yang bermanfaat untuk menciptakan dampak sosial yang positif di kalangan institusi. Salah satunya dengan kegiatan pendampingan kepada setiap lapisan unit kerja di lingkungan institusi hingga masing-masing memiliki keberdayaan yang tinggi dan berkolaborasi menciptakan lingkungan yang berdayaguna dan berhasil dalam mewujudkan visi dan misi bersama IPB 2019-2023.
5. Tahun 2023 adalah *local-global interconnectivity*. Fokus pengembangan IPB pada tahun 2023 adalah menjembatani dan berperan aktif dalam membangun konektivitas lokal, nasional, regional dan internasional. Berdiri sendiri menghadapi persaingan global bukanlah pilihan yang tepat. Perluasan interkonektivitas menjadi solusi cerdas dalam menghadapi tantangan-tantangan di era disrupsi. Kerjasama dan kolaborasi di era persaingan global menjadi perhatian utama IPB dalam memenangkan kompetisi dan menghantarkan inovasi IPB mendunia.

Gambaran skema pentahapan dan tema kerja periode 2019-2023 dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Skema Pentahapan dan Tema Kerja Periode 2019-2023

Program-program IPB merupakan program unggulan sebagai bentuk realisasi atas penerapan konsep industri 4.0 di jenjang pendidikan tinggi. Program-program IPB dikelompokkan menjadi 10 bidang pengembangan. Keterkaitan satu sama lain antar bidang dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Keterkaitan 10 bidang pengembangan IPB

Masing-masing bidang pengembangan IPB memiliki kelompok-kelompok program sebagaimana dijabarkan berikut ini:

1. Bidang Pendidikan: *Education for Millennial Generation*

a. Penyelenggaraan pendidikan

- Penyelarasan proses pembelajaran, ada (dua) pendekatan yaitu sistem "*blended learning*" dan atau MOOCs (*Massive Open Online Courses*), ODL (*Online Distance Learning*, yang pelaksanaan pembelajarannya mengacu pada Sistem Pembelajaran Daring Indonesia – SPADA)
- Pemantapan *life based learning* dalam menghasilkan lulusan unggul, lincah dan adaptif perubahan
- Pemutahiran kecakapan dan keterampilan dosen dalam proses pembelajaran virtual yang meliputi penyiapan bahan ajar virtual/*e-learning* bukan sekedar CBI (*Computer-based Instruction*), pengembangan *heutagogik* untuk pembelajaran *virtual*, dan pengembangan rancangan asesmen hasil pembelajaran virtual dalam perspektif ketercapaian *LO – Learning Outcome*
- Akses pendidikan tinggi untuk anak petani, peternak, nelayan dan masyarakat sekitar hutan
- Pengembangan dan penguatan implementasi kelas internasional, *double degree*, *credit transfer*, dan *exchange* dengan meningkatkan kualitas serta kekuatan konektivitas dan kolaborasi IPB dengan mitra strategis baik pada level Nasional maupun Internasional
- Penguatan *Expected Learning Outcome (ELO) based education* dengan mengintensifkan *research-based teaching* dan *student-centered learning*

b. Penataan Program Studi dan Kurikulum

- Reorientasi Kurikulum dengan pendekatan tiga literasi baru, integrasi *hard skills* dan *soft skills* ke dalam struktur kurikulum, memetakan dan memutakhirkan *school of thought* / aras keilmuan pendidikan IPB dalam perspektif literasi baru melalui penataan program studi multi strata
- Rekonstruksi struktur kurikulum Sekolah Vokasi IPB 4.0 dalam perspektif tiga literasi baru dengan pendekatan *Work-based Curricula* mengacu pada rancangan gabungan blok kurikulum dan sistem 3-2-1
- Penataan program studi dan pemantapan kurikulum berorientasi keilmuan terkini mengacu rencana arsitektur akademik IPB 2045
- Inisiasi perancangan embrio *Global Schoolhouse* IPB sebagai katalis dalam menemukan dan mengembangkan keilmuan spesifik dalam perspektif literasi baru, melalui pembukaan "Sekolah" di IPB (*school or college level*). Diharapkan pada tahun 2045 menjadi "Hub Pendidikan" dalam *Techno-Socio-Entrepreneurial (TSE)*.

- c. Penguatan Pendidikan Kewirausahaan dan Pendidikan Karakter
 - Penyiapan profesi-profesi baru yang menjadi peluang terbuka di era Revolusi Industri 4.0 akibat dari disruptif pekerjaan di era ini berubah (banyak pekerjaan yang tidak eksis lagi karena sudah ditinggalkan).
 - Penguatan pendidikan kewirausahaan dan bisnis secara berkelanjutan melalui pengembangan dan pemutakhiran *school of thought* Sekolah Bisnis IPB
- d. Peningkatan Kualitas *Intake*
 - Peningkatan kualitas intake melalui terobosan “Undangan Talenta Kepemimpinan” (Jalur Ketua OSIS, dll)

2. Bidang Penelitian: *Research Excellence Toward Techno-Socio-Entrepreneurial University*

- a. Pengembangan Penyelenggaraan Penelitian
 - Pengembangan skema insentif penelitian, mobilitas, publikasi internasional.
 - Penguatan sinergi dan kerjasama dengan lembaga penelitian, pemerintah dan swasta level nasional dan global
- b. Pengembangan Keilmuan
 - Shaping payung dan peta jalan riset dengan basis keilmuan terintegrasi dan transdisiplin menuju *world class sciences*
 - Pengembangan riset untuk pembangunan etalase kedaulatan pangan, energi, dan maritim 4.0
 - Perancangan *roadmap* riset terapan sekolah vokasi
- c. Pendayagunaan Riset
 - Peningkatan daya guna riset melalui *knowledge management system* untuk pengayaan akademik, *comdev*, *policy reform*, dan *scaling up* inovasi-inovasi riset
- d. Pengembangan dan Klasterisasi Pusat Penelitian
 - Pendirian pusat-pusat studi yang sesuai tuntutan jaman

3. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat: *Enriching Society for Socio Resilience*

- a. Pelayanan dan Peran IPB bagi Masyarakat
 - Pembangunan TANI *Center* untuk peningkatan pelayanan dan penguatan kapasitas petani, peternak, pembudidaya ikan, nelayan, dan masyarakat sekitar hutan
 - Pengembangan kemitraan *eco-villages* dan penguatan Stasiun Lapangan
 - Penguatan posisi IPB dalam membangun aliansi strategis kebijakan nasional dan daerah
 - Penguatan ekonomi, sosial dan ekologi masyarakat lingkaran kampus dengan *outcome* yang terukur
 - Pengembangan skema insentif bagi civitas unggul dalam pemberdayaan masyarakat
 - Perancangan model PPM Sekolah Vokasi

- Pembangunan Museum Pertanian dan Kemaritiman
- Peningkatan kualitas *mobile and cyber extension*
- b. PPM Internasional
 - Pengembangan *cross border student mobility* melalui KKN internasional

4. Bidang Pengembangan Inovasi dan Bisnis: *Innovation Driven Business Development*

- a. Pengembangan Inovasi
 - Konstruksi etalase kedaulatan pangan, energi, dan maritim terintegrasi untuk melahirkan *technosocioentrepreneur* unggul
 - Pengembangan skema insentif HAKI dan inovasi dosen dan staf
- b. Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa dan Alumni
 - Penguatan *Start-Up School* untuk memfasilitasi kewirausahaan mahasiswa dan alumni
- c. Pengembangan Bisnis
 - Komersialisasi inovasi IPB sebagai *income generating* berbasis *e-commerce* dan *m-commerce*
 - Akselerasi peran IPB *Science and Techno Park* untuk menumbuhkan *science-based business*
 - Optimalisasi aset-aset IPB termasuk laboratorium untuk memperkuat keilmuan serta *income generating activities*
 - Penyusunan *masterplan* Bisnis IPB secara holistik
- d. Pengembangan *Endowment Fund*
 - Stimulasi kinerja badan usaha milik IPB untuk *endowment fund*

5. Bidang Organisasi: *Healthy Organization and Smart Governance*

- a. Efektivitas dan Efisiensi Sistem Organisasi
 - Reformulasi sistem remunerasi yang berkeadilan, transparan, dan mensejahterakan
 - Pemantapan implementasi otonomi IPB sebagai PTNBH
 - Penguatan SIMAKER yang lebih *robust* dan *simple*
 - Penguatan peran fakultas dan sekolah dalam penyelenggaraan Tri Dharma IPB
 - Penataan operasionalisasi dan pemantapan sistem manajemen Sekolah Vokasi
 - Penguatan sistem penjaminan mutu berbasis teknologi digital
 - Pengkajian perubahan bentuk organisasi dan nama institusi
 - Transformasi digital pada manajemen modern IPB dalam reformasi birokrasi.
- b. Peningkatan Ranking IPB
 - Inisiasi perancangan sistem perankingan yang sesuai dengan IPB dalam skema WUR IPB dan peningkatan ranking IPB berdasarkan perankingan yang diakui dunia
 - Rebranding dan penguatan *Technology Transfer Office* (TTO) (pindah ke organisasi)

- Rebranding pertanian untuk meningkatkan daya tarik pemuda/i menjadi *techno-socioentrepreneur* baru
- *Rebranding* IPB untuk kepentingan peningkatan kualitas *input* mahasiswa maupun kerjasama

6. Bidang Sumber Daya Manusia: *Human Capital in Digital Era*

- a. Peningkatan Kinerja SDM
 - Pengembangan *Talent Center* sebagai wadah *capacity building* tendik dan dosen
 - Sinergi sistem perencanaan dan sistem rekrutmen SDM untuk mendapatkan ukuran optimal (*right sizing*)
 - Konstruksi pola pengembangan karir tenaga kependidikan dan dosen
 - Percepatan modernisasi sistem administrasi kepegawaian berbasis digital
 - Penguatan aliansi strategis dengan Kementerian untuk pengembangan SDM
- b. Peningkatan Kualitas SDM
 - Rekrutmen pegawai IPB Non PNS mengacu Peraturan ASN
 - Pengembangan skema kesejahteraan holistik bagi tendik dan dosen

7. Bidang Keuangan: *Financial Sustainability and Good Governance*

- a. Peningkatan Sumber Pendanaan
 - Diversifikasi dan intensifikasi sumber-sumber pendanaan alternatif Non SPP dan Non DIPA, melalui pemanfaatan aset IPB, SBSN, CSR Perusahaan, maupun bantuan luar negeri (seperti Timur Tengah)
 - Boosting profitabilitas Satuan Usaha Akademik, Satuan Usaha Komersial dan Satuan Usaha Penunjang
 - Inisiasi program USR (*University Social Responsibility*) sebagai bagian dari CSR IPB Penguatan sistem manajemen keuangan yang terintegrasi berbasis IT
 - Penggalangan dan pengelolaan *endowment fund*
- b. Peningkatan Pengelolaan Keuangan
 - Penguatan akuntabilitas penganggaran, pemanfaatan, pelaporan, dan pengawasan dana
 - Penguatan sistem manajemen keuangan yang terintegrasi berbasis IT

8. Bidang Prasarana dan Sarana: *Green and Smart Infrastructure*

- a. Pengelolaan Sarana dan Prasarana
 - Penguatan sinergi untuk mendorong akses sarana dan prasarana transportasi yang lancar dan nyaman menuju kampus IPB Darmaga
 - Peningkatan stabilitas dan efisiensi penggunaan listrik dan air
 - Revitalisasi Agriananda sebagai Labschool pendidikan karakter untuk putra-putri Dosen dan Tendik IPB

- b. Kecukupan dan Mutu Sarana dan Prasarana
 - Pemutakhiran fasilitas laboratorium dan fasilitas belajar lainnya sesuai standar nasional dan internasional
 - Percepatan rehabilitasi asrama mahasiswa dan pembangunan Wisma IPB
 - Pemutakhiran prasarana dan sarana perkuliahan dan riset berstandar internasional
- c. Pengembangan Sarana dan Prasarana
 - Pembangunan *twinning laboratory* melalui kerjasama nasional dan internasional
 - Pembangunan *Smart Campus* IPB Darmaga Tahap 3 yang ramah penyandang disabilitas
 - Pembangunan *smart* dan *green building* sebagai wahana konektivitas peneliti IPB dengan dunia internasional
 - Pembangunan taman pemakaman untuk Dosen dan Tendik IPB
 - Pembangunan *Central Dining Hall* untuk menjamin ketersediaan dan keamanan pangan mahasiswa IPB
 - Perintisan pembangunan *Health Center* IPB
 - Fasilitasi *student lounge* di setiap fakultas
 - Penguatan sistem keamanan, kebersihan, dan keselamatan kerja berstandar internasional
 - Konsolidasi sistem transportasi kampus ramah lingkungan
 - Implementasi prinsip *zero waste management*

9. Bidang Teknologi dan Komunikasi: **Robust ICT System**

- a. Peningkatan Kapasitas Infrastruktur IT
 - Penguatan infrastruktur IT yang *robust*
 - Penerapan sistem informasi manajemen berbasis *mobile* yang adaptif terhadap kultur digital untuk reputasi IPB
- b. Pengembangan Sistem Informasi
 - Integrasi sistem informasi untuk pengelolaan *big data*, perbaikan tata kelola, dan kapasitas pengelola
 - Restrukturisasi strategi promosi IPB (*media relation, Green TV, Agri FM*)
- c. Pengelolaan Database IPB
 - Pengembangan *digital library* dan sistem arsip modern
 - Modernisasi fungsi perpustakaan sebagai pusat informasi dan *knowledge mana-gement system*

10. Bidang Kemahasiswaan dan Alumni: **Excellent Students and Graduates for Techno-Sociopreneurship**

- a. Pembinaan Karakter, *Soft Skill*, Kepemimpinan, dan Kewirausahaan
 - Pembangunan *talent-pool* mahasiswa sebagai sarana penguatan karakter, jiwa nasionalisme, kepemimpinan, kewirausahaan, dan *soft skills* milenium

- Penguatan pendidikan karakter dan kebangsaan melalui pendidikan anti korupsi dan revitalisasi mata kuliah PPKU
- Pendidikan kepemimpinan secara terstruktur
- b. Peningkatan Kesejahteraan Mahasiswa
 - Pemetaan dan peningkatan status gizi dan kualitas kesehatan mahasiswa dan pencegahan penggunaan obat-obatan terlarang dan perilaku hidup tidak sehat
 - Perancangan dan implementasi program *IPB Care* untuk mahasiswa
- c. Pengembangan Minat, Bakat, dan Penalaran Mahasiswa
 - Modernisasi organisasi kemahasiswaan dan klasterisasi *student center*
 - Pengembangan fasilitas dan prestasi olahraga dan seni mahasiswa
- d. Peningkatan Interaksi Lintas Budaya
 - Multiplikasi *exchange program* mahasiswa untuk penguatan internasionalisasi dan prestasi mahasiswa
- e. Pembinaan Karir Lulusan, Hubungan dengan Alumni dan Layanan Kemahasiswaan
 - Kapitalisasi *alumni engagement* dalam pencapaian IPB unggul
 - Pengembangan sistem pelayanan terpadu dan modern untuk mahasiswa dan alumni
 - Penerbitan sertifikat *soft skill* sebagai pendamping ijazah
 - Penguatan program pengembangan karir pada bidang jasa-jasa dan industri
 - Program magang mahasiswa

BAB II

**KINERJA IPB TAHUN 2020 DAN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN IPB
TAHUN 2021-2022**

A. Gambaran Kondisi IPB

1. Kondisi Internal

IPB sebagai lembaga pendidikan tinggi pemerintah di dalam menjalankan tugasnya di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan lembaga pelayanan publik. Oleh karenanya standar-standar pelayanan publik yang berlaku harus menjadi acuan bagi IPB sehingga dapat menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik. Peraturan Ombudsman Nomor 17 tahun 2015 tentang Penelitian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik menyebutkan bahwa variabel standar pelayanan publik untuk kementerian dan lembaga meliputi: (1) standar pelayanan, (2) maklumat pelayanan, (3) sistem informasi pelayanan publik, (4) sarana, prasarana, dan fasilitas, (5) pelayanan khusus, (6) pengelolaan pengaduan, (7) penilaian kinerja, (8) visi, misi, dan moto pelayanan, (9) atribut, dan (10) pelayanan terpadu.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mengamanatkan bagi penyelenggara negara dan badan publik lain, termasuk IPB, untuk menyediakan informasi publik kepada masyarakat/pihak yang membutuhkan. Indeks respon terhadap pelayanan informasi publik merupakan ukuran evaluasi pelayanan dalam memberikan informasi publik. Pengelolaan informasi publik di IPB dilaksanakan dengan acuan Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2015. Layanan informasi IPB telah diapresiasi secara nasional. IPB pada tahun 2016 telah meraih Peringkat III Keterbukaan Informasi Publik, Kategori Perguruan Tinggi Negeri, yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat RI.

Selama ini pengelolaan keuangan di IPB telah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Hasil pengelolaan yang telah dilakukan tercermin dari pencapaian tujuan dan sasaran serta rencana kinerja yang telah ditetapkan. Sebagai institusi pemerintah, IPB di dalam pengelolaan keuangannya berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan keuangan setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan keuangan IPB tahun 2018 telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menurut penilaian auditor independen Kantor Akuntan Publik (KAP) Sriyadi Elly Sugeng dan rekan. Opini WTP dari KAP telah diperoleh IPB sejak tahun 2008 atau selama 13 tahun berturut-turut

dari tahun 2008-2020. Opini WTP dari KAP ini merupakan salah satu kekuatan IPB dalam hal pengelolaan keuangannya.

Di mulai tahun 2017 IPB berupaya untuk menuntaskan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan (SIMKeu) terintegrasi. SIMKeu ini akan terintegrasi dengan Sistem Perencanaan dan Pengembangan, Sistem Pendapatan, Sistem Akuntansi, Sistem Perpajakan, Sistem Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Anggaran, Sistem Persediaan dan Aset, Sistem Imbal Jasa, dan Sistem Pengawasan dan Pengendalian. Melalui SIMKeu terintegrasi ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di IPB. Sampai saat ini SIMKeu terintegrasi ini sudah terimplementasi dengan terus melakukan pengembangan lainnya seperti sistem persediaan asset, sistem perpajakan, dll.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta IPB, menyebutkan bahwa perangkat organisasi IPB diatur dengan Peraturan MWA. Berdasarkan Ketetapan MWA Nomor 125/MWA-IPB/2013, organisasi IPB terdiri atas organ: (i) penentu yang terdiri atas Majelis Wali Amanat (MWA) dan Senat Akademik, (ii) pengelola yaitu Rektor dan Wakil Rektor, (iii) Pelaksana akademik terdiri atas fakultas, sekolah pascasarjana, program pendidikan khusus, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, departemen, Lembaga Kawasan Sains dan Teknologi (LKST) dan pusat, (iv) Pelaksana administrasi yaitu direktorat, kantor, dan biro, dan (v) penunjang yang meliputi perpustakaan, unit arsip, unit kesehatan, unit olahraga dan seni, divisi/laboratorium, bengkel, rumah sakit hewan, *Science Techno Park (STP)*, satuan usaha, satuan keamanan dan ketertiban, dan bentuk lainnya.

Organisasi IPB disusun dengan tujuan agar IPB dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Sampai saat ini organisasi IPB telah berjalan dengan efektif. Hal ini ditandai dengan pencapaian kinerja IPB setiap tahunnya yang cukup baik. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta IPB, menyebutkan bahwa pegawai IPB terdiri atas dosen dan tenaga kependidikan. Pegawai tersebut terdiri atas: (a) PNS yang dipekerjakan, (b) pegawai tetap, dan (c) pegawai tidak tetap. Jumlah pegawai atau SDM IPB adalah 3.494 orang, dengan rincian sebagai berikut: (a) PNS berjumlah 2.481 orang, terdiri atas 1.202 dosen dan 1.279 tenaga kependidikan; (b) Pegawai Tidak Tetap atau pegawai kontrak berjumlah 1.013 orang, terdiri atas 157 orang dosen dan 958 orang tenaga kependidikan.

Dosen IPB adalah pegawai yang diangkat oleh Institut berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian dan kemampuannya untuk melaksanakan tugas pokok di bidang pendidikan, disamping tugas di bidang penelitian dan atau pelayanan pada masyarakat. Dosen tetap IPB berjumlah 1.359 orang, terdiri atas 1.202 orang dosen PNS dan 157 orang dosen non PNS. Dosen IPB yang telah mendapatkan sertifikasi berjumlah 1.118 orang. Jumlah dosen bersertifikasi tersebut termasuk dosen yang telah mencapai jabatan Guru Besar sebanyak 236 orang.

Kondisi fisik sarana dan prasarana, baik ruang kuliah maupun laboratorium IPB pada umumnya baik. Total ruang kuliah yang tersedia saat ini untuk program sarjana, program pascasarjana dan program diploma masing-masing adalah 140 ruangan, 124 ruangan, dan 66 ruangan dengan kondisi baik. Beberapa ruangan membutuhkan perbaikan/renovasi kecil dan penambahan fasilitas. Saat ini, ukuran ruang kuliah bervariasi dengan kapasitas antara 50 orang sampai dengan 160 orang per kelas. Perkuliahan dengan ukuran 100 orang atau lebih per kelas dilakukan untuk mata kuliah di Program Pendidikan Kompetensi Umum.

Seiring dengan penambahan jumlah mahasiswa, IPB masih memerlukan penambahan ruang kuliah. Mulai tahun 2016 IPB telah melakukan penambahan jumlah kelas sebanyak 7 (tujuh) ruang, 2 (dua) ruang kelas Departemen Biologi dan 5 (lima) ruang kelas FEM. Penambahan fasilitas juga dilakukan berupa kursi kuliah, komputer, LCD *projector*, layar atau *white board* dan AC atau kipas angin untuk meningkatkan kenyamanan ruangan kuliah. Tahun 2018 IPB mendapatkan dukungan dana dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk Gedung Pendidikan dan peralatan laboratorium. Pada tahun 2021 IPB menambah jumlah ruang kuliah melalui pendanaan sisa lebih. Sedangkan tahun 2022 IPB akan terus meningkat fasilitas gedung pendidikan dan peralatan laboratorium yang pendanaannya bersumber dari sisa lebih.

Peningkatan kualitas fasilitas akademik selalu dilakukan, selain melalui program renovasi dan rehabilitasi, juga melalui pengadaan sarana prasarana ruang kuliah dan alat laboratorium untuk mengganti yang sudah rusak maupun yang sudah *out of date*. Penggantian peralatan laboratorium tidak dapat dilakukan secara sekaligus, namun tetap terus diperbaharui secara bertahap setiap tahunnya.

2. Kondisi Eksternal

Dinamika produk hukum yang dikeluarkan pemerintah terkait penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh PTN Badan Hukum merupakan salah faktor yang selalu harus dipertimbangkan di dalam penyelenggaraan program dan kegiatan IPB setiap tahunnya. Salah satunya adalah dari segi pendanaan yang bersumber dari pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum menyebutkan bahwa pendanaan PTN badan hukum dapat bersumber dari APBN, dan selain APBN. Pendanaan yang bersumber dari APBN diberikan dalam bentuk bantuan pendanaan PTN (BPPTN) Badan Hukum, dan/atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BPPTN dapat dipergunakan untuk mendanai: (a) biaya operasional, (b) biaya dosen, (c) biaya tenaga kependidikan, (d) biaya investasi, dan (e) biaya pengembangan. Aturan lebih teknis terkait BPPTN diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian BPPTN Badan Hukum.

Permasalahan yang dihadapi IPB terkait BPPTN BH (khususnya BPPTN non operasional) adalah kesulitan dalam memperkirakan berapa jumlah yang akan diterima, sementara rencana kegiatan dan anggaran (RKA) tahunan harus sudah dibuat pada akhir tahun sebelum tahun anggaran berikutnya berjalan. Kepastian BPPTN atau pagu BPPTN definitif umumnya baru diketahui setelah tahun anggaran berjalan. Kondisi ini sering menyebabkan dilakukannya revisi terhadap RKA yang telah dibuat. Sementara itu proses revisi RKA harus melalui pengesahan dan persetujuan Majelis Wali Amanat (MWA) yang membutuhkan waktu sehingga dapat menghambat pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.

Kondisi perekonomian nasional, regional maupun global merupakan faktor yang juga turut dipertimbangkan dalam penyusunan RKA IPB, karena akan berpengaruh terhadap rencana pelaksanaan program dan kegiatan yang dananya bersumber dari kerjasama dengan pihak luar. Selama ini IPB menganut prinsip optimistik untuk perencanaan program-program kerjasamanya. Hal ini dimaksudkan agar semua unsur atau unit kerja dapat bekerja maksimal memanfaatkan potensi-potensi kerjasama yang ada, baik dengan pihak dalam negeri maupun luar negeri.

3. Asumsi Makro

a. Tingkat Inflasi

Kementerian Keuangan menetapkan sasaran inflasi pada 2022-2024. Jenis sasaran inflasi yang ditetapkan dan diumumkan merupakan indeks harga konsumen (IHK) tahunan di akhir tahun. Bentuk sasaran yang ditetapkan merupakan titik dengan toleransi (point with deviation). Tingkat dan periode sasaran inflasi 3 persen untuk tahun 2022, 3 persen untuk tahun 2023, dan 2,5 persen untuk tahun 2024 dengan deviasi sebesar 1 persen.

Penetapan target inflasi tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.010/2021. PMK ini merupakan acuan bagi penyusunan program kerja pemerintah dan Bank Indonesia (BI) ke depan. Sasaran inflasi terus diarahkan ke tingkat lebih rendah dan stabil untuk mendukung daya beli dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Perhitungan sasaran inflasi mengacu pada persentase kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) di akhir tahun dibandingkan dengan akhir tahun sebelumnya. Pemerintah dan BI berkomitmen untuk terus meningkatkan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter dalam rangka pencapaian sasaran inflasi yang telah ditetapkan.

b. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga dua tahun ke depan akan cenderung moderat. Pertumbuhan ekonomi tahun 2022 ditetapkan sebesar 5,2%, hal tersebut tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN) tahun 2022. Tahun 2022 dinilai akan menjadi momentum akselerasi pertumbuhan ekonomi bagi Indonesia.

c. Kurs 1 US\$ = Rp. 13.900 - Rp 14.800

Asumsi nilai tukar rupiah pada tahun 2022 di kisaran 13.900 – 14.800 terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Beberapa faktor yang menjadi kekhawatiran adalah pandemi Covid-19 yang belum berakhir. Kemudian perekonomian global, khususnya negara maju seperti Amerika Serikat (AS) yang mampu tumbuh lebih cepat di luar perkiraan.

d. Tingkat Bunga Deposito

Suku bunga deposito pada tahun 2022 diperkirakan sebesar 3,5% .

e. Tingkat Bunga Pinjaman

Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan di 4,25% dan diprediksikan akan merangkak naik di tahun 2022.

4. Asumsi Mikro

a. Kebijakan akuntansi sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku

Kebijakan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan IPB sebagai Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTN-BH) mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 (PSAK 45), yaitu sistem akuntansi untuk organisasi nirlaba. Laporan keuangan tersebut dilakukan *review* oleh Kantor Audit Internal IPB (KMMAI-IPB) dan setelah itu dilakukan audit oleh auditor independen (Kantor Akuntan Publik/KAP) yang diseleksi oleh Komite Audit.

b. Subsidi yang masih diterima dari pemerintah

Dana yang diterima IPB dari pemerintah dapat dibedakan ke dalam dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN/DIPA) yang merupakan APBN rutin dan Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (BPPTN-BH) yang merupakan subsidi pemerintah.

Pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN/DIPA) khusus untuk pembiayaan belanja pegawai terdiri dari Gaji, Uang Makan, Tunjangan, Sertifikasi dan Tunjangan Kehormatan, yang mekanisme pengelolaannya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk keuangan Negara. Pembiayaan dilakukan mengacu pada: (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; dan (3) Keputusan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pembiayaan yang bersumber dari BPPTN-BH digunakan untuk mendukung pembiayaan operasional perguruan tinggi yang terkait langsung dengan penyelenggaraan pendidikan (Tridarma Perguruan Tinggi). Untuk pengelolaan

keuangan yang bersumber dari BPPTN-BH dilakukan dengan mengacu pada: (1) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa; (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; (3) Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTN BH; dan (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (BPPTN-BH).

c. Asumsi tarif

Penggunaan tarif di IPB mengacu pada Surat Keputusan Rektor IPB nomor 47/IT3/KU/2017 tentang Standar Biaya Institut Pertanian Bogor yang merupakan satuan biaya batas tertinggi dan satuan biaya estimasi yang digunakan di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

d. Asumsi volume pelayanan

Pelayanan di IPB diberikan kepada civitas akademika yang meliputi mahasiswa, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan (pegawai). Asumsi jumlah mahasiswa (student body) sebanyak 29.034 orang. Jumlah tenaga pendidik (dosen) terdiri dari PNS 1.223 orang dan non PNS 157 orang, sedangkan tenaga kependidikan (pegawai) terdiri dari PNS 1.282 orang dan non PNS 1.025 orang.

e. Pengembangan pelayanan baru

Pengembangan pelayanan baru yang saat ini dilakukan meliputi pelayanan SPP *multipayment* untuk memudahkan mahasiswa melakukan pembayaran biaya pendidikan pada berbagai bank mitra yang bekerjasama dengan IPB. Selain itu, untuk meningkatkan pelayanan internal, pengelolaan keuangan menggunakan sistem informasi keuangan terintegrasi dengan penganggaran.

B. Pencapaian Kinerja, Program Kerja, serta Target Kinerja IPB

Indikator kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen kontrak kinerja tahun 2021 antara Rektor IPB dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi terdiri atas empat sasaran dan 10 indikator kinerja. Sasaran-sasaran dan indikator-indikator kinerja tersebut, yaitu: (1) Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi; sasaran ini terdiri atas dua indikator kinerja, yaitu: (a) Rata-rata predikat SAKIP, dan (b) Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L; (2) Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi; terdiri atas dua indikator kinerja, yaitu: (a) Persentase lulusan S1 dan Program Diploma yang berhasil dapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta dengan pendapatan cukup, dan (b) Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling tidak 20 sks di luar kampus atau meraih prestasi minimal tingkat nasional; (3) Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran; terdiri atas tiga indikator kinerja, yaitu: (a) Persentase prodi S1 dan Diploma yang melaksanakan kerjasama dengan mitra, (b) Persentase mata kuliah S1 dan Diploma yang menggunakan pemecahan kasus (*case method*) atau *project-based learning* sebagai sebagian bobot evaluasi, dan (c) Persentase prodi S1

dan Diploma yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah; dan (4) Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi; terdiri atas tiga indikator kinerja, yaitu: (a) Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain, di QS 100 (berdasarkan ilmu), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi minimal tingkat nasional dalam 5 tahun terakhir, (b) Persentase dosen tetap berkualifikasi S3, memiliki sertifikasi kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja, atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja, dan (c) Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil dapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.

Secara umum kinerja IPB tahun 2021 masuk kategori baik. Dari 10 indikator kinerja sebanyak delapan indikator atau 80% telah mencapai atau melebihi target kinerja yang ditetapkan. Sebanyak dua indikator kinerja atau sebesar 20% masih belum mencapai target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja per tanggal 15 Oktober dan perkiraan capaian kinerja IPB tahun 2021 disajikan pada **Tabel 1**.

Predikat SAKIP IPB pada tahun 2021 berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Kementerian *Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi* adalah A dengan nilai 80,66. Dengan demikian capaian untuk indikator ini telah melebihi 100% atau telah melampaui target yang ditetapkan, yaitu BB. Hasil ini menunjukkan bahwa tata kelola IPB telah dilakukan dengan baik. Hasil ini juga mencerminkan bahwa IPB telah melakukan perencanaan kinerja dengan baik, telah mampu menyelaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang direncanakan dengan baik, menyesuaikan apa yang dilaksanakan dengan yang dianggarkan dengan baik, dan telah melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya dengan baik.

Capaian IPB untuk indikator kinerja rata-rata nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L adalah 98,41 atau persentase capaian telah melebihi 100%. Pelaksanaan RKA-K/L untuk IPB sebagai PTNbh adalah pelaksanaan kegiatan Layanan Perkantoran untuk pembayaran gaji dan tunjangan, sehingga walaupun capaian untuk indikator ini telah baik, IPB masih tetap harus melakukan perencanaan dan pelaksanaan anggaran untuk pembayaran gaji dan tunjangan lebih baik lagi, agar kinerja anggarannya dapat lebih tinggi lagi. Hal yang perlu dilakukan adalah updating data pada sistem informasi kepegawaian harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Realisasi kinerja dari dua indikator kinerja yang ada pada sasaran kinerja meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi masih belum mencapai target yang telah ditetapkan. Realisasi kinerja dari indikator kinerja persentase lulusan S1 dan Program Diploma yang berhasil dapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta dengan pendapatan cukup adalah sebesar adalah sebesar 40,35% atau persentase capaian sebesar 50,44% dari target yang ditetapkan sebesar 80%. Penyebab

tidak tercapainya target indikator kinerja ini adalah rendahnya capaian kinerja untuk beberapa komponen yang terdapat pada indikator kinerja ini, di antaranya jumlah lulusan yang mendapatkan pekerjaan <6 bulan dan menjadi wiraswasta dengan pendapatan cukup; dan jumlah lulusan yang melanjutkan studi. Nampaknya masa pandemi Covid-19 yang menyebabkan kondisi ekonomi nasional yang masih belum pulih memberikan andil tidak tercapainya target kinerja untuk indikator ini.

Tabel 1. Perkiraan Capaian Kinerja IPB Berdasarkan Kontrak Kinerja Tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Capaian 15 Okt	Perkiraan Capaian 31 Des
1	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	Rata-rata predikat SAKIP	BB	A	A
		Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	80,0	82.30	98.41
2	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	Persentase lulusan S1 dan Program Diploma yang berhasil dapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta dengan pendapatan cukup	80.0%	28%	40.35% (50.44%)
		Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling tidak 20 sks di luar kampus atau meraih prestasi minimal tingkat nasional	30.0%	5%	6,67% (22,23%)
3	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	Persentase prodi S1 dan Diploma yang melaksanakan kerjasama dengan mitra	50.0%	85%	100% (>100%)
		Persentase mata kuliah S1 dan Diploma yang menggunakan pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau <i>project-based learning</i> sebagai sebagian bobot evaluasi	35.0%	60%	60% (>100%)
		Persentase prodi S1 dan Diploma yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah	5.0%	24%	24% (>100%)
4	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain, di QS 100 (berdasarkan ilmu), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang	20.0%	26%	26% (>100%)

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Capaian 15 Okt	Perkiraan Capaian 31 Des
		berhasil meraih prestasi minimal tingkat nasional dalam 5 tahun terakhir			
		Persentase dosen tetap berkualifikasi S3, memiliki sertifikasi kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja, atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja	40.0%	72%	72% (>100%)
		Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil dapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen	1,5	2,63	3,32 (>100%)

Upaya terkait peningkatan capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut sebenarnya sudah dilakukan, seperti membangun kerja sama dengan mitra baik institusi pemerintah maupun swasta dalam pelaksanaan kegiatan magang yang diharapkan dapat meningkatkan percepatan lulusan dalam mendapatkan pekerjaan, pelaksanaan program *Fast Track* untuk mempercepat lulusan melanjutkan studi, dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan kewirausahaan mahasiswa dan lulusan. Ke depan program-program terkait indikator persentase lulusan S1 dan Program Diploma yang berhasil dapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta dengan pendapatan cukup, perlu terus didorong dan ditingkatkan.

Perkiraan capaian kinerja untuk indikator kinerja persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling tidak 20 sks di luar kampus atau meraih prestasi minimal tingkat nasional adalah 6.67% masih di bawah target kinerja yang ditetapkan yaitu 30% atau persentase capaian kinerja sebesar 22,23%. Penyebab rendahnya capaian kinerja dari indikator kinerja ini adalah masih sangat sedikitnya lulusan yang menghabiskan minimal 20 sks di luar kampus. Hal ini karena kebijakan merdeka belajar baru diluncurkan pada pertengahan tahun 2020, sehingga masih membutuhkan waktu untuk dapat diimplementasikan dengan baik. Saat ini IPB telah merancang program-program yang tepat untuk dapat mendorong peningkatan jumlah lulusan yang menghabiskan minimal 20 sks di luar kampus.

Capaian kinerja dari ketiga indikator kinerja yang terdapat pada sasaran kinerja meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran, semuanya telah mencapai target yang ditetapkan. Capaian untuk indikator kinerja persentase prodi S1 dan Diploma yang melaksanakan kerjasama dengan mitra adalah 100%, melebihi target yang

ditetapkan, yaitu 50%, sehingga persentase capaian kinerja dari indikator ini lebih besar dari 100%. Capaian sebesar ini karena kondisi sampai dengan tahun 2021 semua prodi S1 dan Diploma yang ada di IPB telah melaksanakan dan membangun kerja sama dengan mitra, baik dengan instansi pemerintah maupun dengan swasta, baik kerja sama dalam bidang pendidikan maupun non pendidikan, terutama di dalam pengembangan kurikulum program studi sehingga sesuai dengan kebutuhan kerja.

Realisasi kinerja untuk indikator kinerja persentase mata kuliah S1 dan Diploma yang menggunakan pemecahan kasus (*case method*) atau *project-based learning* sebagai bagian bobot evaluasi adalah 60%, melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 35%. Pada tahun 2021 jumlah mata kuliah (MK) S1 dan Diploma ada sebanyak 1.872 MK dan 60% diantaranya telah melaksanakan *project-based learning*. Walaupun realisasinya telah mencapai target yang ditetapkan, ke depan perlu dibuat petunjuk baku berupa POB dan SK Rektor sebagai payung hukum untuk mendukung dan meningkatkan jumlah mata kuliah S1 dan Diploma yang menggunakan metode pemecahan kasus sebagai bobot evaluasinya.

Capaian kinerja dari indikator kinerja persentase prodi S1 dan Diploma yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah adalah 24%, melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 5,0%, sehingga persentase capaian untuk indikator kinerja ini lebih besar dari 100%.

Capaian kinerja untuk tiga indikator kinerja yang terdapat pada sasaran kinerja meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi semuanya telah melampaui target yang ditetapkan (persentase capaian lebih dari 100%). Realisasi dari ketiga indikator kinerja tersebut secara berturut-turut adalah 26% dari target yang ditetapkan sebesar 20,0%, 72% dari target yang ditetapkan sebesar 40,0%, dan 3,32 dari target yang ditetapkan sebesar 1,5.

Secara nasional jika dilihat dari aspek pendidikan, dosen IPB termasuk SDM yang unggul. Keunggulan dosen IPB juga terlihat dari capaian indikator jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil dapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen. Keunggulan IPB yang lain juga terlihat dari capaian sasaran meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran yang realisasi semua indikator kerjanya dapat melampaui dari target yang telah ditetapkan.

Realisasi Kinerja IPB Berdasarkan SIMAKER

Sistem Manajemen Kinerja (SIMAKER) IPB berfungsi sebagai pedoman bagi setiap unit kerja dan individu di IPB dalam mengukur kemajuan dan keberhasilan setiap program/kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi IPB. SIMAKER sebagai suatu sistem manajemen setiap tahun dievaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan pengembangan, baik terkait sistemnya maupun indikator-indikator kerjanya.

SIMAKER IPB tahun 2021 telah mengalami perubahan guna penyesuaian dengan 8 IKU perguruan tinggi dan Renstra IPB 2019-2023 hasil revisi. Kinerja IPB tahun 2021 berdasarkan SIMAKER diukur berdasarkan capaian dari lima perspektif, di mana masing-masing perspektif ini terdiri atas satu atau lebih indikator. Kelima perspektif tersebut yaitu: (1) kualitas lulusan, dengan dua indikator kinerja, yaitu: (a) daya serap lulusan, dan (b) prestasi mahasiswa); (2) reputasi, dengan satu indikator kinerja, yaitu QS WUR by Subject; (3) kualitas manajemen, dengan dua indikator kinerja, yaitu: (a) jumlah prodi akreditasi internasional, dan (b) opini WTP; (4) kontribusi, dengan dua indikator kinerja, yaitu: (a) jumlah inovasi yang dikomersialkan, dan (b) jumlah keluaran penelitian yang dimanfaatkan masyarakat; dan (5) kinerja dosen, dengan tiga indikator kinerja, yaitu: (a) jumlah publikasi internasional terindeks scopus per dosen, (b) jumlah publikasi internasional terindeks global non scopus per dosen, dan (c) jumlah publikasi terindeks SINTA per dosen.

Perkiraan capaian kinerja IPB tahun 2021 untuk kelima perspektif yang ada dalam SIMAKER 2021 adalah sebesar 85,18%. Capaian ini menunjukkan kinerja IPB pada tahun 2021 adalah sangat baik. Perkiraan capaian kinerja IPB tahun 2021 berdasarkan SIMAKER disajikan pada **Tabel 2**.

Tabel 2. Perkiraan Capaian Kinerja IPB Tahun 2021 Berdasarkan SIMAKER

No.	Indikator	Capaian 15 Okt	Capaian 31 Des
1	Kualitas lulusan	37.52%	75.22%
	a. Daya serap lulusan	46.88%	50.44%
	b. Prestasi mahasiswa	28.16%	100%
2	Reputasi	92.00%	92.00%
	a. Qs WUR by subject	92%	92%
3	Kualitas manajemen	80.35%	80.35%
	a. Jumlah prodi akreditasi internasional	60.17%	60.17%
	b. Opini WTP	100%	100%
4	Kontribusi	40.95%	91,65%
	a. Jumlah inovasi yang dikomersialkan	46.88%	100%
	b. Jumlah keluaran penelitian yang dimanfaatkan masyarakat	28.16%	83.33%
5	Kinerja Dosen	43.33%	86.67%
	a. Jumlah publikasi internasional terindeks scopus per dosen	0.62	1.0
	b. Jumlah publikasi internasional terindeks global non scopus	0.38	0.8
	c. Jumlah publikasi terindeks SINTA	0.40	0.8
Total Capaian			85.18%

Kinerja kualitas lulusan masih perlu terus ditingkatkan, terutama terkait daya serap lulusan. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memperbanyak kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri untuk membuka dan memperbesar peluang kesempatan kerja kepada para lulusan IPB. Prestasi mahasiswa IPB baik di tingkat nasional maupun internasional yang telah baik, perlu terus dijaga, dipertahankan bahkan ditingkatkan. Untuk itu pembinaan dan pendampingan yang dapat memicu prestasi mahasiswa yang telah dilakukan selama ini perlu terus dilanjutkan.

Kinerja pemeringkatan internasional QS WUR *by subject Agriculture & Forestry* menunjukkan hasil yang baik. IPB berada pada peringkat 67 dari peringkat 50 yang ditargetkan. Semoga ke depan prestasi ini dapat terus ditingkatkan.

Kontribusi IPB untuk masyarakat dan negara dalam rangka pembangunan telah cukup banyak dan telah pula memberi banyak manfaat, walaupun demikian sumbangsih ini masih tetap perlu ditingkatkan lagi. Capaian kinerja jumlah inovasi yang dikomersialkan dan keluaran penelitian yang dimanfaatkan masyarakat, termasuk di dalamnya hilirisasi sudah cukup signifikan. Hal ini disebabkan oleh usaha terus menerus yang dilakukan IPB utamanya melalui: (1) upaya untuk mendapatkan program *matching fund*, yaitu dana yang disediakan oleh Kemdikbudristek untuk pengembangan hilirisasi inovasi yang dihasilkan perguruan tinggi dengan kebutuhan yang diperlukan oleh Industri, Dunia Usaha dan Dunia Kerja (IDUKA) sehingga menghasilkan produk yang dapat berdayaguna untuk masyarakat secara sosial dan ekonomi. *Matching fund* menjadi salah satu nilai tambah terbentuknya kolaborasi antara dua pihak melalui *platform* Kedaireka. Jumlah inovasi IPB yang didanai dan jumlah dana yang diperoleh melalui program *matching fund* adalah yang terbanyak, yaitu 34 inovasi. (2) pemahaman rezim HKI untuk memapankan hilirisasi, (3) pendaftaran HKI selain paten, yaitu hak cipta (umumnya buku terbitan IPB), dan (4) realisasi pembagian manfaat (misalnya *royalty*) dari HKI yang berhasil didayagunakan (komersialisasi). IPB merupakan perguruan tinggi yang sangat aktif untuk mempromosikan seluruh invensi menjadi inovasi prospektif yang kemudian diterapkan baik melalui jalur sosial (*sociopreneur*) ataupun teknologi (*technopreneur*).

Kinerja untuk perspektif kualitas manajemen khususnya untuk indikator jumlah prodi yang terakreditasi internasional masih perlu ditingkatkan lagi. Prodi-prodi yang telah siap untuk akreditasi internasional perlu terus didorong untuk segera mempersiapkan dan mengajukan akreditasi internasional. Sementara itu untuk kinerja keuangan, IPB masih terus dapat mempertahankan kinerja baiknya, yaitu dengan diperolehnya opini WTP atas Laporan Keuangan IPB tahun 2020 dari Kantor Akuntasn Publik (KAP) Sriyadi Elly Sugeng & Rekan. Opini WTP dari KAP telah dipeoleh IPB sejak tahun 2008, sehingga WTP yang diperoleh IPB pada tahun 2021 atas laporan keuangan tahun 2020 ini merupakan yang ke-13 kali secara berturut-turut. Kinerja keuangan yang baik ini perlu terus dipertahankan.

Kinerja dosen IPB tahun 2021 cukup signifikan terutama untuk indikator kinerja jumlah publikasi internasional terindeks scopus per dosen yang telah dapat memenuhi target yang ditetapkan. Sementara untuk publikasi internasional terindeks global non scopus dan publikasi terindeks SINTA, masih perlu dorongan agar dapat meningkatkan kinerjanya, walaupun saat ini capaiannya telah baik. Salah satu upaya yang telah dilakukan untuk mendorong pencapaian kinerja dari indikator ini adalah pendampingan dan pemberian insentif publikasi.

C. Rencana Kegiatan

Dalam Rencana Kerja dan Anggaran IPB tahun 2022, target kinerja yang telah ditentukan akan dijabarkan dalam rencana kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan IPB. Rencana kegiatan tersebut akan membidik sasaran dan indikator kinerja yang telah di tentukan, baik di tingkat kementerian maupun di tingkat IPB. Dukungan pendanaan untuk melaksanakan rencana kegiatan dalam RKA IPB 2022 tersebut berasal dari berbagai sumber, yaitu APBN maupun non APBN. Secara rinci target kinerja yang ingin dicapai dan sumber pendanaannya disajikan pada **Tabel 3**.

Tabel 3
Rencana Kegiatan Tahun 2022

(x 1000)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Biaya					Total Biaya
			APBN				Selain APBN	
			Gaji dan Tunjangan PNS (001)	BPPTNBH dari Setditjen Diktiristek	Alokasi Pendanaan Unit/Institusi lain	Pinjaman		
1	Kesiapan kerja lulusan: Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil: a. mendapat pekerjaan; b. melanjutkan studi; atau c. menjadi wiraswasta.	Persen (tahunan)	27.512.945	10.000.000	-	6.916.900	32.000.000	76.429.845
2	Mahasiswa di luar kampus: Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang: a. menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau b. meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	Persen (tahunan)	27.512.945	50.000.000	5.500.405	6.916.900	170.000.000	259.930.250
3	Dosen di luar kampus: Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.	Persen (tahunan)	27.512.945	15.000.000	1.266.750	6.916.900	80.000.000	130.696.595

No	Indikator Kinerja	Satuan	Biaya					Total Biaya
			APBN				Selain APBN	
			Gaji dan Tunjangan PNS (001)	BPPTNBH dari Setditjen Diktiristek	Alokasi Pendanaan Unit/Institusi lain	Pinjaman		
4	Kualifikasi dosen: Persentase dosen tetap: a. berkualifikasi akademik S3; b. memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau c. berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	Persen (tahunan)	27.512.945	10.000.000	9.000.000	6.916.900	67.000.000	120.429.845
5	Penerapan riset dosen: Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	Persen (tahunan)	27.512.945	8.000.000	68.000.000	6.916.900	320.000.000	430.429.845
6	Kemitraan program studi: Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	Persen (tahunan)	27.512.945	8.000.000	-	6.916.900	120.000.000	162.429.845
7	Pembelajaran dalam kelas: Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok	Persen (tahunan)	27.512.945	33.500.000	12.800.000	6.916.900	120.000.000	200.729.845

No	Indikator Kinerja	Satuan	Biaya					Total Biaya
			APBN				Selain APBN	
			Gaji dan Tunjangan PNS (001)	BPPTNBH dari Setditjen Diktiristek	Alokasi Pendanaan Unit/Institusi lain	Pinjaman		
	berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.							
8	Akreditasi Internasional: Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	Persen (tahunan)	27.512.945	8.000.000	269.840	6.916.900	50.000.000	92.699.685
9	Rata-rata predikat SAKIP satker minimal BB	predikat	27.512.945	6.000.000		6.916.900	13.685.816	54.115.661
10	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	nilai	27.512.945	5.633.410	-	6.916.900	12.000.000	52.063.255

D. Sarana dan Prasarana

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada Bab 1, sesuai dengan rencana strategis, terutama dalam mencapai visi IPB menjadi perguruan tinggi berbasis riset bertaraf internasional, salah satu hal yang penting adalah pengembangan sarana prasarana pendidikan dan riset. IPB membutuhkan berbagai pengembangan terutama bidang inovasi untuk menunjang tri dharma perguruan tinggi. Usulan pengembangan inovasi disajikan pada **Tabel 4**

Tabel 4
Sarana dan Prasarana Tahun 2022

No.	Sarana dan Prasarana	Anggaran (Rp)
1.	Pengembangan sarana prasarana bidang inovasi	69.169.000.000
	Total	69.169.000.000

E. Biaya dan Sumber Pembiayaan

Untuk dapat melaksanakan rencana kegiatan yang terdapat dalam RKA IPB 2022 tentunya diperlukan biaya yang berasal dari berbagai sumber pembiayaan. Biaya dan sumber pembiayaan IPB berasal dari dua sumber, yaitu APBN yang terdiri dari APBN rutin berupa gaji dan tunjangan, dan BPPTN BH yang merupakan bantuan pendanaan bagi PTN BH dari pemerintah. Selain APBN, sumber pembiayaan yang lain adalah dari dana masyarakat yang berupa uang kuliah dari mahasiswa, kerjasama, satuan usaha, dll. Secara rinci besarnya biaya dan sumber pembiayaan dalam RKA IPB 2022 ini disajikan pada **Tabel 5** dan **Tabel 6**.

E. Biaya dan Sumber Pembiayaan

E.1. Biaya

Tabel 5. Biaya

KOMPONEN BIAYA	REALISASI 2020	ANGGARAN 2021	ANGGARAN 2022	ANGGARAN 2022							
				Belanja Pegawai		Honor Terkait Kegiatan/Tim		Belanja Modal		Belanja Barang	
				Biaya	Volume	Biaya	Volume	Biaya	Volume	Biaya	Volume
E.1.1. BIAYA (GAJI DAN TUNJANGAN PNS)	280.165.797	279.565.797	275.129.453	275.129.453	2.481 peg						
1. BIAYA DOSEN PNS	213.195.170	212.595.170	206.719.209	206.719.209	1.469 Peg						
A. Gaji Dan Tunjangan	84.709.713	84.709.713	90.315.366	90.315.366	1.469 Peg						
B. Tunjangan Jabatan Akademik	15.635.830	15.635.830	14.507.043	14.507.043	1.469 Peg						
C. Tunjangan Profesi	66.137.400	66.137.400	57.736.800	57.736.800	882 Peg						
D. Tunjangan Kehormatan	30.966.000	30.366.000	31.860.000	31.860.000	236 Peg						
E. Uang Makan	15.746.227	15.746.227	12.300.000	12.300.000	1.469 Peg						
2. BIAYA TENAGA KEPENDIDIKAN PNS	66.970.627	66.970.627	68.410.244	68.410.244	1.012 Peg						
A. Gaji dan Tunjangan	56.473.142	56.473.142	60.210.244	60.210.244	1.012 Peg						
B. Uang Makan	10.497.485	10.497.485	8.200.000	8.200.000	1.012 Peg						
E.1.2. BIAYA (BPPTNBH)	137.291.369	144.914.035	154.133.410	30.200.000	731 Peg	-	-	7.500.000	28 Paket	116.433.410	90 Pkt/Keg
1. OPERASIONAL	77.115.000	91.593.035	105.218.410	-	-	-	-	3.500.000	28 Paket	101.718.410	62 Pkt/Keg
A. Pendidikan	54.215.000	70.705.469	79.458.410	-	-	-	-	3.500.000	23 Paket	75.958.410	53 Pkt/Keg
- Pemeliharaan bangunan, mesin, jaringan, dan kebersihan	23.800.000	28.403.600	29.300.000	-	-	-	-	-	-	29.300.000	30 Pkt/Keg
- Kegiatan penunjang pembelajaran	8.000.000	15.100.000	15.358.410	-	-	-	-	-	-	15.358.410	5 Pkt/Keg
- Pengadaan Peralatan	3.000.000	1.103.369	3.500.000	-	-	-	-	3.500.000	4 Paket	-	-

KOMPONEN BIAYA	REALISASI 2020	ANGGARAN 2021	ANGGARAN 2022	ANGGARAN 2022							
				Belanja Pegawai		Honor Terkait Kegiatan/Tim		Belanja Modal		Belanja Barang	
				Biaya	Volume	Biaya	Volume	Biaya	Volume	Biaya	Volume
Pembelajaran dan Perkantoran											
- Kegiatan Kemahasiswaan dan Alumni	14.615.000	12.100.000	16.250.000	-	-	-	-	-	-	16.250.000	10 Pkt/Keg
- Mobilitas dosen dan Kerjasama Internasional	800.000	140.000	600.000	-	-	-	-	-	-	600.000	2 Pkt/Keg
- Peningkatan kapasitas TIK penunjang pendidikan	4.000.000	13.858.500	14.450.000	-	-	-	-	-	-	14.450.000	6 Pkt/Keg
B. Penelitian	-	251.700	1.400.000	-	-	-	-	-	-	1.400.000	2 Pkt/Keg
C. Pengabdian Kepada Masyarakat	-	2.165.000	4.000.000	-	-	-	-	-	-	4.000.000	10 Pkt/Keg
D. Manajemen	22.900.000	18.470.866	20.360.000	-	-	-	-	-	-	20.360.000	12 Pkt/Keg
2. BIAYA DOSEN NON PNS	2.500.000	2.500.000	2.600.000	2.600.000	38 Peg	-	-	-	-	-	-
A. Gaji Dan Tunjangan	2.275.000	2.275.000	2.300.000	2.300.000	38 Peg	-	-	-	-	-	-
B. Uang Makan	225.000	225.000	300.000	300.000	38 Peg	-	-	-	-	-	-
3. BIAYA TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS	27.500.000	27.500.000	27.600.000	27.600.000	893 Peg	-	-	-	-	-	-
A. Gaji dan Tunjangan	25.025.000	25.025.000	25.100.000	25.100.000	893 Peg	-	-	-	-	-	-
B. Uang Makan	2.475.000	2.475.000	2.500.000	2.500.000	893 Peg	-	-	-	-	-	-
4. INVESTASI	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-	-	-	-	4.000.000	1Paket	-	-
5. PENGEMBANGAN	26.176.369	19.321.000	14.715.000	-	-	-	-	-	-	14.715.000	26 Pkt/Keg
A. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi	8.776.369	2.070.000	1.850.000	-	-	-	-	-	-	1.850.000	4 Pkt/Keg
B. Keilmuan/Keahlian Dosen dan Tenaga Kependidikan	1.000.000	270.000	540.000	-	-	-	-	-	-	540.000	2 Pkt/Keg
C. Pengembangan Lainnya yang Disebutkan dalam Renstra PTNBH	8.900.000	2.423.000	3.525.000	-	-	-	-	-	-	3.525.000	5 Pkt/Keg

KOMPONEN BIAYA	REALISASI 2020	ANGGARAN 2021	ANGGARAN 2022	ANGGARAN 2022							
				Belanja Pegawai		Honor Terkait Kegiatan/Tim		Belanja Modal		Belanja Barang	
				Biaya	Volume	Biaya	Volume	Biaya	Volume	Biaya	Volume
D. Pengembangan yang Merupakan Penugasan dari Pemerintah	7.500.000	14.558.000	8.800.000	-	-	-	-	-	-	8.800.000	15 Pkt/Keg
E.1.3. BIAYA (ALOKASI DARI UNIT/INSTITUSI LAIN)	42.535.978	42.535.978	96.836.995	-	-	2.000.000	150 Org	20.000.000	50 Paket	74.836.995	50 Pkt/Keg
1. Pengembangan Penelitian dan PPM	42.535.978	42.535.978	43.500.000	-	-	2.000.000	150 Org	5.000.000	50 Paket	36.500.000	50 Pkt/Keg
2. Program MBKM	-	-	12.800.000	-	-	-	-	3.000.000	2 Paket	9.800.000	4 Pkt/Keg
3. Program Kemahasiswaan	-	-	5.500.405	-	-	-	-	-	-	5.500.405	6 Pkt/Keg
4. Matching Fund	-	-	25.000.000	-	-	-	-	10.000.000	10 Paket	15.000.000	35 Pkt/Keg
5. Program Inovasi	-	-	8.500.000	-	-	-	-	2.000.000	2 Paket	6.500.000	3 Pkt/Keg
6. Program Pengembangan Sumberdaya	-	-	1.266.750	-	-	-	-	-	-	1.266.750	2 Pkt/Keg
7. Bantuan Program Akreditasi Internasional	-	-	269.840	-	-	-	-	-	-	269.840	2 Pkt/Keg
E.1.4. BIAYA (PINJAMAN)	-	95.475.000	69.196.000	-	-	-	-	69.196.000	4 Paket	-	-
INVESTASI (PHLN/SBSN)	-	95.475.000	69.196.000	-	-	-	-	69.196.000	4 Paket	-	-
A. Pengembangan Inovasi IPB	-	95.475.000	69.196.000	-	-	-	-	69.196.000	4 Paket	-	-
E.1.5. BIAYA (SELAIN APBN)	914.985.207	916.585.207	984.658.816	184.500.000	4622 Peg	126.800.000	-	135.700.000	-	537.658.816	-
1. OPERASIONAL	315.000.000	315.000.000	349.520.356	-	-	99.300.000	4850 Org	30.700.000	20 Paket	219.520.356	802 Pkt/Keg
A. Pendidikan	125.000.000	125.000.000	135.035.356	-	-	9.000.000	1500 Org	3.500.000	8 Paket	122.535.356	293 Pkt/Keg
B. Penelitian	60.000.000	60.000.000	71.350.000	-	-	47.000.000	800 Org	1.780.000	4 Paket	22.570.000	452 Pkt/Keg
C. Pengabdian Kepada Masyarakat	50.000.000	50.000.000	60.000.000	-	-	37.000.000	2300 Org	1.420.000	3 Paket	21.580.000	37 Pkt/Keg
D. Manajemen	80.000.000	80.000.000	83.135.000	-	-	6.300.000	250 Org	24.000.000	5 Paket	52.835.000	20 Pkt/Keg
2. BIAYA DOSEN NON PNS	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	120 Peg	-	-	-	-	-	-

KOMPONEN BIAYA	REALISASI 2020	ANGGARAN 2021	ANGGARA N 2022	ANGGARAN 2022							
				Belanja Pegawai		Honor Terkait Kegiatan/Tim		Belanja Modal		Belanja Barang	
				Biaya	Volume	Biaya	Volume	Biaya	Volume	Biaya	Volume
3. BIAYA TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	150 Peg	-	-	-	-	-	-
4. INVESTASI	103.985.207	105.585.207	105.000.000	-	-	-	-	105.000.000	12 Paket	-	-
5. PENGEMBANGAN	324.000.000	324.000.000	345.638.460	-	-	27.500.000	2.100 Orang	-	-	318.138.460	193 Pkt/Keg
A. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi	120.000.000	120.000.000	124.000.000	-	-	9.000.000	1.500 Orang	-	-	115.000.000	150 Pkt/Keg
B. Keilmuan/Keahlian Dosen dan Tenaga Kependidikan	10.000.000	10.000.000	12.640.000	-	-	2.000.000	100 Orang	-	-	10.640.000	40 Pkt/Keg
C. Pengembangan Lainnya yang Disebutkan dalam Renstra PTNBH	162.000.000	162.000.000	168.843.460	-	-	12.500.000	150 Orang	-	-	156.343.460	6 Pkt/Keg
D. Pengembangan yang Merupakan Penugasan dari Pemerintah	32.000.000	32.000.000	40.155.000	-	-	4.000.000	350 Orang	-	-	36.155.000	2 Pkt/Keg
6. REMUNERASI	163.000.000	163.000.000	175.500.000	175.500.000	2389 Peg	-	-	-	-	-	-
Grand Total (Biaya Gaji dan Tunjangan PNS+ BPPTNBH+ Pinjaman+ Selain APBN)	1.374.978.351	1.479.076.017	1.579.954.674	489.829.453	-	128.800.000	-	232.396.000	-	728.929.221	-

E.2. Sumber Pembiayaan**Tabel 6
Sumber Pembiayaan**

SUMBER PEMBIAYAAN	REALISASI 2020	ANGGARAN 2021	ANGGARAN 2022
E.2.1. APBN	459.993.144	562.490.810	595.295.858
A. Gaji dan Tunjangan PNS (001)	280.165.797	279.565.797	275.129.453
B. BPPTN BH dari Setditjen Diktiristek	137.291.369	144.914.035	154.133.410
C. Pinjaman SBSN	-	95.475.000	69.196.000
D. Alokasi Pendanaan dari Unit/Institusi Lain	42.535.978	42.535.978	96.836.995
E.2.2. SELAIN APBN	914.985.207	916.585.207	984.658.816
A. Dana Masyarakat	985.207	985.207	1.000.000
B. Biaya Pendidikan	417.000.000	417.000.000	417.000.000
1. Diploma	84.000.000	84.000.000	84.000.000
2. Sarjana (UKT)	210.000.000	210.000.000	210.000.000
3. Sarjana (Non UKT)	8.000.000	8.000.000	8.000.000
4. Magister (S2)	81.000.000	81.000.000	81.000.000
5. Doktorat (S3)	28.000.000	28.000.000	28.000.000
6. Profesi	6.000.000	6.000.000	6.000.000
C. Usaha PTN BH	52.000.000	42.000.000	42.000.000
1. Satuan Usaha Penunjang (SUA)	12.000.000	12.000.000	12.000.000
2. Satuan Usaha Penunjang (SUP)	22.000.000	20.000.000	20.000.000
3. Satuan Usaha Komersial (SUK)	18.000.000	10.000.000	10.000.000
D. Kerja sama Tridharma Perguruan Tinggi	371.000.000	373.000.000	436.058.816
1. Kerjasama Pendidikan	53.000.000	55.000.000	92.058.816
2. Kerjasama Penelitian dan PPM	95.000.000	95.000.000	120.000.000
E. Pengelolaan Kekayaan PTN BH	22.000.000	22.000.000	22.000.000
F. APBD	35.000.000	41.600.000	41.600.000
TOTAL	1.374.978.351	1.479.076.017	1.579.954.674

F. Kajian Resiko

Tabel 7
Kajian Risiko

No	IKU	Uraian Risiko	Level Risiko	Rencana Penanganan Risiko
1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	Banyaknya lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang belum mendapatkan pekerjaan	Tinggi	Melakukan pemetaan terhadap lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.
2	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (duapuluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	<ul style="list-style-type: none"> • Banyaknya lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang belum menghabiskan paling sedikit 20 (duapuluh) sks di luar kampus • Jumlah prestasi tingkat nasional yang tidak tercapai 	Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 untuk menghabiskan paling sedikit 20 (duapuluh) sks di luar kampus • Melakukan upaya dalam rangka meningkatkan prestasi pada tingkat nasional
3	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	Belum banyaknya program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	Sedang	Melakukan berbagai macam kerjasama dengan mitra
4	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	Belum banyaknya mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	Tinggi	Terus mengembangkan mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project)

No	IKU	Uraian Risiko	Level Risiko	Rencana Penanganan Risiko
5	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	Belum banyaknya program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	Sedang	Mendorong program studi S1 dan D4/D3/D2 untuk melakukan persiapan dan pendampingan dalam hal akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.
6	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.	Belum banyaknya dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.	Tinggi	Mendorong para dosen untuk melakukan kegiatan tridarma di kampus lain bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa untuk dapat meraih prestasi
7	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	<ul style="list-style-type: none"> Banyaknya dosen tetap yang belum berkualifikasi akademik S3; Banyaknya dosen tetap yang belum memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja 	Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong dan memberikan kesempatan bagi dosen tetap untuk melanjutkan studi Melakukan upaya-upaya bagi dosen tetap untuk mendapatkan sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja
8	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	Tidak tercapainya keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	Tinggi	Memberikan pembiayaan bagi dosen untuk melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat

No	IKU	Uraian Risiko	Level Risiko	Rencana Penanganan Risiko
9	Rata-rata predikat SAKIP satker minimal BB	Penilaian rata-rata predikat SAKIP yang rendah	Sedang	Melakukan upaya-upaya peningkatan predikat SAKIP
10	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L yang rendah	Tinggi	Melakukan upaya-upaya peningkatan nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L yang rendah

G. Informasi Lainnya

Mutu laboratorium layanan sains IPB telah memenuhi standarisasi ISO 17025 sehingga kualitas analisis dan hasil pengukuran semakin baik dan diakui secara internasional. Saat ini terdapat 10 laboratorium layanan sains telah mendapat sertifikasi ISO 17025, yaitu: (1) Laboratorium Pengujian Departemen Teknologi Industri Pertanian, (2) Laboratorium Produktifitas dan Lingkungan Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, (3) Laboratorium Jasa Analisis Pangan Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, (4) Pusat Penelitian Lingkungan Hidup, (5) Pusat Studi Biofarmaka Tropika, (6) Laboratorium Kimia Terpadu, (7) Laboratorium IPB *Culture Collection* Departemen Biologi, (8) Departemen Agronomi dan Hortikultura, (9) Departemen Ilmu Penyakit Hewan dan Kesmavet, (10) Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan. Selain itu ada sebanyak 20 unit kerja (fakultas, sekolah, departemen, dan unit penunjang) yang sudah mendapatkan ISO 9001:2008.

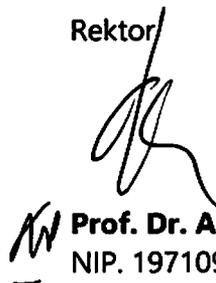
BAB III

PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) IPB Tahun 2022 disusun dengan merujuk pada Rencana Jangka Panjang (RJP) IPB 2019-2045 dan Renstra IPB 2019-2023, dengan memperhatikan usulan kegiatan dan anggaran seluruh unit kerja di lingkungan IPB. Rancangan RKA IPB Tahun 2022 mengakomodasikan program prioritas nasional dan kegiatan-kegiatan yang merupakan tugas dan fungsi IPB dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dengan menyajikan rencana program/kegiatan dan anggaran tahun 2021 yang menyeluruh untuk seluruh unit di lingkungan IPB.

Sumber pendanaan yang dikelola IPB dalam rancangan RKA IPB 2022 bersumber dari APBN (Gaji dan tunjangan, BPPTN BH, dan pendanaan dari unit/institusi lain) dan non APBN (Dana masyarakat) yang harus dikelola secara efektif dan efisien untuk mencapai target kinerja kementerian dan kinerja IPB yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada peraturan dan perundangan yang berlaku. Oleh karena itu, dokumen rancangan RKA IPB Tahun 2022 ini menjadi salah satu acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan di lingkungan IPB.

Rektor/



Prof. Dr. Arif Satria, SP, M.Si
NIP. 197109171997021003